

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

2023

PERWAL NO. 10, BERITA DAERAH 2023/NO. 10

PERWAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka tertib administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Kartu Kredit Pemerintah Daerah digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2023
 - BD Tahun 2023 No. 10
- Lampiran berisi Format:
1. Permohonan persetujuan up kkpd dan surat pernyataan up
 2. Surat pernyataan up
 3. Surat persetujuan besaran uang persediaan kkpd skpd/unit skpd
 4. Surat permohonan penerbitan kkpd
 5. Surat referensi
 6. Daftar pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan kkpd
 7. Daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan kkpd
 8. Daftar pembayaran tagihan kkpd
 9. Surat pemberitahuan penolakan
 10. BAST
 11. Persyaratan kartu kredit pemerintah daerah
 12. Fitur dan benefit kartu kredit pemerintah